

# ISU SOSIAL-BUDAYA DAN EKONOMI SEPUTAR FENOMENA PENJUAL MADU WARGA SUKU BADUY KE WILAYAH DKI JAKARTA DAN SEKITARNYA

*(Socio-Cultural and Economic Issues Regarding the Baduy People Phenomena Selling Traditional Honey to Jakarta and its Surrounding Areas)*

**Hariyadi**

Pusat Penelitian, Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI  
Gedung Nusantara 1, Lantai 2, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270  
Email: farahhar@yahoo.com

Naskah diterima: 6 Desember 2018

Naskah direvisi: 2 Februari 2019

Naskah diterbitkan: 30 Juni 2019

## **Abstract**

*The Baduy people phenomena selling their traditional honey to Jakarta and its surrounding areas reflects common phenomena amid changes in the social lives, economic rationalism, demographic changes, and spill-over effect from other people's life style. In the long term, however, such a phenomenon may disadvantage the community it self. With the very limited rate of their access to education and high embeddedness to their social and cultural values, this phenomenon may expose them to the urban people values. This study aims to analyse factors driving the phenomena, analysing what impacts the phenomena may pose to the Baduy people socio-cultural life, and finally what government may responds to this issue. By using the social changes and socio-cultural life system theoretical perspective, this basic qualitative study concluded that in the context of strengthened socio-cultural and economic values putting land as living invaluable modalities, the Baduy people phenomenon selling their traditional honey to Jakarta and its surrounding areas may give an impact to the degrading of the community's socio-cultural and economic values. This study recommends the needs for the government to thoroughly oversee the implementation of social forestry program and to set an affirmative policies to manage social issues in the Baduy indigenous people including to this phenomena.*

*Key words: Baduy customary community, honey-sale phenomena, socio-cultural and economic values, social issues, social change*

## **Abstrak**

Fenomena masyarakat Suku Baduy yang menjual madu ke Jakarta dan sekitarnya mencerminkan fenomena umum seiring dengan adanya pergeseran pola kehidupan, rasionalisme ekonomis, faktor pertumbuhan demografis, dan efek-tetes gaya hidup masyarakat non-Suku Baduy sendiri. Di dalam jangka panjang, bagaimanapun fenomena ini dapat merugikan masyarakat Suku Baduy itu sendiri. Sangat terbatasnya tingkat pendidikan dan tingginya keterikatan terhadap nilai-nilai sosio-budaya mereka, fenomena ini akan menghadapkan mereka pada nilai-nilai sosio-budaya dan ekonomi masyarakat urban. Studi ini ditujukan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mendorong terjadinya fenomena tersebut dan dampaknya terhadap keberadaan sistem kehidupan sosio-budaya mereka, serta apa yang perlu dilakukan pemerintah terhadap persoalan ini. Dengan menggunakan kerangka pemikiran tentang perubahan sosial dan pembangunan sistem kehidupan sosial budaya, kajian dasar dengan pendekatan kualitatif menyimpulkan bahwa konteks kuatnya nilai-nilai sosio-budaya dan ekonomis setempat sebagai modal kehidupan utama, fenomena masyarakat Suku Baduy tersebut dapat berpotensi menggerus nilai-nilai sosio-budaya dan ekonomi masyarakat Suku Baduy tersebut. Kajian ini merekomendasikan pemerintah pusat dan daerah untuk mengawal implementasi program perhutanan sosial dan kebijakan masyarakat hukum adat untuk mempertahankan sistem kehidupan sosio-ekonomi dan budaya masyarakat tersebut. Keperluan 'intervensi' pemerintah untuk mendorong kebijakan-kebijakan afirmatif untuk mengelola fenomena tersebut menjadi hal yang perlu mendapatkan kemauan politik pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Kata kunci: Suku Baduy, penjual madu, nilai-nilai sosio-budaya dan ekonomis, perubahan sosial, persoalan sosial

## **PENDAHULUAN**

Fenomena masyarakat Suku Baduy (Suku Baduy) menjual hasil hutan, seperti madu, ke wilayah Jakarta dan sekitarnya mulai terlihat kuat belakangan ini meskipun fenomena ini sebenarnya telah berjalan lama di wilayah Banten sendiri. Fenomena ini terjadi secara insidental, tidak terstruktur, dan bersifat alamiah sehingga tidak dapat dinilai sebagai sebuah gerakan ekonomi informal masyarakat yang menetap atau berusaha menjadikan penjualan madu sebagai kegiatan sebagaimana terjadi pada kaum pendatang. Dalam batas tertentu, fenomena ini didorong oleh efek demonstratif sesama masyarakat Suku Baduy

yang secara individual menjual madu ke Jakarta dan sekitarnya.

Masyarakat Suku Baduy adalah suatu kelompok masyarakat adat Sunda di Kabupaten Lebak, Banten. Nomenklatur "Baduy" berasal atau dianalogikan dengan Suku Arab Badawi nomaden yang pertama kali dipakai oleh peneliti Belanda. Nomenklatur ini juga bisa dirujuk pada wilayah Sungai Baduy dan Gunung Baduy di mana suku ini tinggal. Sumber lain menyebutkan bahwa suku ini sebenarnya lebih suka menyebut diri sebagai "Urang Kanekes" sesuai dengan nama wilayah mereka, atau yang mengacu kepada nama kampung seperti Urang Cibeo (Garna

(1993) dalam Helmi, 2018). Suku Baduy terdiri dari Suku Baduy Luar dan Baduy Dalam. Suku Baduy Luar adalah mereka yang telah keluar dari adat dan wilayah Baduy Dalam baik melalui pemoderatan adat istiadat setempat maupun pernikahan. Sementara itu, Suku Baduy Dalam adalah suku yang masih memegang teguh adat istiadat mereka, misalnya kebiasaan tidak menggunakan kendaraan untuk bepergian dan tidak beralas kaki (Garna (1993) dalam Suhadi, 2012). Hal yang sedikit membedakan, Suku Baduy Luar lebih mengenal teknologi (Permana, 2010).

Secara sosio-ekonomi fenomena tersebut menjadi sesuatu yang umum terutama jika dilihat dari rasionalitas setiap komunitas untuk memenuhi kehidupan atau tingkat kesejahteraan seiring dengan besarnya potensi pasar dan dekatnya jarak tempuh ke Jakarta. Di sisi lain adalah semakin terbatasnya ketersediaan sumber daya lokal akibat penurunan hasil lahan masyarakat tersebut sendiri masih memiliki kearifan lingkungan yang kuat (Republika.co.id., 2016; Prihantoro, 2006). Studi Walhi menunjukkan bahwa usulan Pemerintah Kabupaten Lebak untuk melakukan perubahan fungsi kawasan hutan di sebagian wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak sejalan dengan penilaian ini (Walhi Jabar, 2012).

Fenomena tersebut tentu akan membawa nilai positif bagi kehidupan masyarakat tersebut. Namun, fenomena ini juga berpotensi membawa persoalan sosio-budaya dan ekonomi ke depan sehingga dapat semakin menggerogoti keberadaan masyarakat adat itu sendiri. Dalam jangka panjang, hal ini juga akan mendorong terjadinya perubahan sosio-budaya dan ekonomi. Pada sisi ekstrem, perubahan ini bahkan dapat mengarah pada menurunnya tingkat kesejahteraan mereka secara umum (Permana, 2010). Dengan kondisi buta huruf, fenomena penjualan madu juga akan menghadapkan mereka pada nilai-nilai sosio-budaya dan ekonomi baru masyarakat perkotaan. Dalam jangka panjang, dalam hal sumber daya yang dijual tidak tersedia lagi karena degradasi lingkungan dan alih fungsi lahan misalnya, mereka akan berupaya mencari pola-pola pekerjaan di wilayah urban meskipun dengan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, akses tersebut akan sangat kecil (Alambudaya.com., 2010). Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di Jakarta dan sekitarnya, mereka dapat melakukan 'pelanggaran sosial' atau hal-hal di luar pola kehidupan yang bergantung pada alam. Untuk memenuhi kebutuhan dasar selama di Jakarta dan sekitarnya, mereka bahkan dapat melakukan tindakan melawan hukum.

Tidak hanya itu, pola-pola perilaku ekonomi mereka dapat terpengaruh atau bergabung dengan

masyarakat urban ke dalam perilaku yang dapat dikategorikan sebagai perilaku melanggar hukum. Perilaku kecurangan dalam menjual madu yang dilakukan oleh sebagian orang yang mengaku sebagai masyarakat Suku Baduy dapat berpotensi mengilhami mereka untuk melakukan hal yang sama (Putera, 2015). Fenomena ini pada akhirnya akan mengarah pada potensi merosotnya nilai-nilai sosio-budaya Suku Baduy secara umum (Permana, 2010). Sebagai masyarakat yang dikenal mampu mempertahankan adat istiadatnya secara ketat (Permana, 2009), kuatnya 'pajanan' penjual madu pada nilai-nilai budaya urban akan semakin mendorong nilai-nilai rasionalitas. Akibatnya, dalam jangka panjang, nilai-nilai sosio-budaya dan kearifan lokal mereka akan dapat tercerabut.

Dengan gambaran fenomena tersebut, fenomena masyarakat Suku Baduy yang menjual madu ke Jakarta dan sekitarnya berpotensi pada situasi yang justru dapat mengarah pada persoalan sosio-budaya dan ekonomi bagi Suku Baduy, kondisi yang justru mendorong proses perubahan sosial yang dapat merugikan kepentingan sosial ekonomi dan kultural. Dalam kerangka perumusan masalah tersebut, penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut: (1) faktor apa saja yang mendorong fenomena Suku Baduy menjual madu ke Jakarta dan sekitarnya? (2) bagaimana dampak fenomena Suku Baduy menjual madu ke Jakarta dan sekitarnya bagi pembangunan sosial Suku Baduy? dan (3) langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk membantu peningkatan kesejahteraan secara umum untuk keberlanjutan sistem sosio-budaya dan ekonomi masyarakat Suku Baduy?

Penelitian ini bertujuan untuk memperkaya diskursus akademik untuk melihat faktor-faktor yang mendorong fenomena masyarakat adat Suku Baduy penjual madu di wilayah Jakarta dan sekitarnya, menganalisis apakah fenomena dapat memengaruhi pembangunan sosial masyarakat tersebut, dan mengusulkan langkah yang perlu dilakukan pemerintah untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat Suku Baduy secara umum dalam batas-batas kesinambungan sistem sosio-budaya dan ekonomi mereka.

## KERANGKA PEMIKIRAN

### *Pembangunan Sistem Kehidupan Sosial Budaya*

Kerangka berpikir tentang pembangunan sistem kehidupan sosio-budaya (SKSB) dilatarbelakangi oleh kritik terhadap paham *developmentalisme* yang lebih menasar pada pembangunan sektoral daripada membangun manusia secara utuh. SKSB didefinisikan sebagai bangunan dasar sosiologis yang mencakup tiga aspek kehidupan sosio-budaya yang

saling berkaitan, yakni struktur sosial (S), proses sosial (P), dan budaya (B). Dalam pandangan ini, karena setiap masyarakat didasarkan pada sistem interaksi dan inter-relasi yang membentuk kehidupan sosio-budaya, semua pembangunan sektoral harus diarahkan untuk memperkuat kualitas aspek-aspek SKSB tersebut (Wirutomo, 2014).

Struktur sosial didefinisikan sebagai pola relasi kekuasaan, antarkelompok sosial dalam bentuk stratifikasi dan diferensiasi sosial. Atas dasar perbedaan kekuasaan itu, struktur bersifat memfasilitasi masyarakat untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Kekuatan struktur sosial ini dapat terlembagakan secara resmi ke dalam peraturan perundang-undangan maupun kekuatan “memaksa” aktor nonnegara yang bersifat efektif mengatur kehidupan masyarakat melalui fasilitas fisik dan nonfisik yang dibangun. Dengan demikian, pembangunan struktur diarahkan untuk menyeimbangkan pola relasi kekuasaan ke arah yang lebih inklusif (adil, memberikan kesamaan hak) (Wirutomo, 2014).

Sementara itu, aspek proses sosial diartikan sebagai keseluruhan interaksi dinamis sehari-hari antaranggota masyarakat yang sudah maupun belum terlembagakan ke dalam aspek struktural maupun budaya. Aspek ini dapat dilihat melalui serangkaian proses sosial yang bersifat alamiah, kreatif, dan dinamis. Secara empiris, setiap individu maupun kelompok menyampaikan aspirasi secara relatif bebas, bernegosiasi secara informal di tempat-tempat umum atas isu tertentu. Dalam artian yang lebih terstruktur, hal ini juga terjadi dalam bentuk perbincangan di media dan kegiatan unjuk rasa (Wirutomo, 2014). Pada keseluruhan interaksi yang sudah terlembagakan ke dalam struktur maupun kultur, dinamika proses sosial juga terlihat dalam kelembagaan sosial dan publik tertentu (Wirutomo, 2013; Wirutomo, 2014). Dalam konteks siklus kebijakan publik, dinamika proses sosial ini sejalan dengan proses *agenda-setting* dalam bentuk proses sosial antaranggota masyarakat secara informal atas isu kebijakan tertentu (*public stream*) dan proses sosial secara informal antaranggota masyarakat yang konsen atas isu tertentu seperti kelompok kepentingan dan akademisi (*policy stream*) (Hawlett & Ramesh, 1995).

Aspek ketiga SKSB adalah aspek budaya. Budaya, salah satunya, didefinisikan sebagai setiap sistem nilai, norma, kepercayaan, dan semua kebiasaan serta adat istiadat yang telah terinternalisasi dalam setiap individu atau masyarakat sehingga memiliki kekuatan untuk membentuk pola perilaku dan sikap anggota masyarakat (Wirutomo, 2014). Definisi ini sejalan dengan pandangan E. B. Tylor tahun 1871

yang menyatakan kebudayaan sebagai: “kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat” (Soekanto & Sulistyowati, 2017). Sebagai sebuah cara hidup, bagaimanapun budaya masyarakat tidak selalu merupakan cara hidup terbaik bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan determinisme budaya Robert Mac Iver atau Herskovits dan Malinowski bahwa budaya akan menjadi kekuatan memaksa yang dapat mengatur masyarakat itu sendiri ke dalam pola perilaku tertentu (Soemardjan & Soemardi (1964) dalam Soekanto & Sulistyowati, 2017; Wirutomo, 2014).

Sebagai sebuah sistem aspek-aspek SKSB dapat juga saling beririsan dan memengaruhi sehingga dapat membentuk sebuah sistem yang kompleks (Wirutomo, 2014). Setiap irisan antaraspek tersebut dapat membentuk pola gejala sosiologis yang berbeda-beda. Irisan antara aspek S dengan B dapat membentuk pola strukturisasi budaya (*structured culture*), ditandai dengan gejala budaya yang terstruktur. Fenomena pengakomodasian aspek budaya pada kebijakan formal merefleksikan hal ini. Sebaliknya, irisan lain dapat berbentuk pembudayaan struktur (*cultured structure*). Upaya pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan tertentu merefleksikan hal ini. Di sisi lain, irisan juga dapat membentuk proses yang terstruktur (*structured process*) atau sebaliknya, struktur yang terproses (*processed structure*). Kebijakan diskretif negara yang merespons gejala di masyarakat mencerminkan pola irisan *structured process*. Sementara itu, tindakan atau protes masyarakat yang didorong oleh implementasi peraturan yang dianggap kurang tepat mencerminkan pola irisan *processed structure*. Pada irisan lainnya adalah proses yang terbudayakan (*cultured process*) dan sebaliknya budaya yang terproses (*processed culture*). Secara empiris, fenomena protes masyarakat terhadap pembangunan sektoral yang pada akhirnya menjadi nilai-nilai baru dalam setiap kegiatan pembangunan sektoral mencerminkan pola *cultured process*. Pagelaran acara seni untuk mengurangi ketegangan dalam masyarakat mencerminkan pola irisan *processed culture*. Pada akhirnya, pola relasi antar-ketiga aspek tersebut juga dapat membentuk pola yang melingkar karena dalam cengkeraman struktur manusia pada dasarnya akan terus berupaya memengaruhi struktur. Giddens misalnya menggunakan istilah “strukturasi” di mana nilai-nilai yang ada terus mendasari struktur, untuk kemudian memfasilitasi terbentuknya sebuah proses yang baru, dan pada akhirnya mempertegas dan

menciptakan budaya baru atau menurut Bourdieu sebagai *habitus* (Bellah dalam Wirutomo, 2014; Chong, 2015; Lamsal, 2012).

### **Perubahan Sosial**

Dilihat dalam konteks isu pembangunan berkelanjutan, fenomena masyarakat Suku Baduy penjual madu ke wilayah Jakarta dan sekitarnya memiliki relevansi dengan konsepsi perubahan sosial. Perubahan sosial dapat diartikan sebagai proses perubahan sistem sosial dalam jangka waktu tertentu. Perubahan ini mencakup beberapa aspek perubahan yang antara lain terjadi pada struktur dan fungsi masyarakat, pola hubungan sosial, perubahan demografis dan kondisi geografis, perubahan pola kehidupan, dan fenomena sosial tertentu. Dengan demikian, perubahan sosial berikutan di dalamnya nilai-nilai budaya, menjadi proses yang bersifat inheren dalam setiap sistem sosial seiring dengan tingkat perkembangan peradaban itu sendiri. Dengan sifat nilai-nilai sosio-budaya yang membentuk pola perilaku dan sikap masyarakat, perubahan sosial juga pada akhirnya dapat menggerogoti nilai-nilai tersebut sehingga landasan pola perilaku dan sikap masyarakat pun dapat goyah (Wirutomo, 2014). Dalam pandangan ini, perubahan sosial tidak selalu menuju pola yang dikehendaki. Oleh karena itu, perubahan ini juga dapat mengarah pada penyimpangan, trauma, dan utopia. Dalam pandangan ini, perubahan sosial dinilai sebagai kondisi yang tidak ideal sehingga ruang bagi perubahan sosial relatif ditolak untuk menjaga keutuhan sistem sosial itu sendiri karena dalam kondisi tanpa perubahan pun, nilai-nilai sosial tidak selamanya menjadi rujukan sikap dan pola perilaku masyarakat (Prayitno, 2014). Hal ini sejalan dengan pandangan determinisme budaya Robert Mac Iver bahwa sebagai produk masyarakat, nilai-nilai sosial pada akhirnya menjadi kekuatan memaksa yang dapat mengatur masyarakat itu sendiri pada pola tindakan tertentu (Wirutomo 2014). Dalam kondisi ini, perubahan sosial merujuk pada situasi krisis dan bahkan dalam batas tertentu diakibatkan oleh kuatnya pihak luar. Sejumlah faktor turut memperkuat resistensi sistem sosial terhadap perubahan sosial antara lain, sikap dan kuatnya nilai-nilai budaya masyarakat, ketimpangan sosial, stratifikasi sosial yang kaku, dan lain-lain (Prayitno, 2014).

Terlepas dari pandangan ini, perubahan sosial antara lain mencerminkan dinamika masyarakat, kondisi yang pada akhirnya dapat berimplikasi pada perubahan kelembagaan sosial tertentu lainnya. Dengan kata lain, perubahan sosial akan selalu memaksa perubahan nilai-nilai sosio-budaya masyarakat (Prayitno, 2014). Dengan

demikian, hubungan antara perubahan sosial dan pelembagaan nilai sosio-budaya dapat menjadi sebuah pola siklis dalam kehidupan masyarakat. Memposisikan perubahan sosial sebagai bagian dari aspek struktural yang bersifat eksternal, perubahan sosial dapat berperan yang menurut Giddens sebagai sarana "strukturasi" di mana nilai yang hadir akibat perubahan sosial tersebut mendasari nilai sosio-budaya yang baru, dan pada akhirnya mempertegas dan menciptakan kultur atau pola perilaku baru yang menurut Bourdieu sebagai *habitus* (Chong, 2015; Lamsal, 2012).

Secara umum, faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan sosial antara lain (1) interaksi dengan budaya lain, (2) sistem pengetahuan/ pendidikan, (3) sikap untuk berubah, (4) sikap terbuka/toleransi terhadap perbuatan yang menyimpang, (5) stratifikasi sosial masyarakat yang terbuka, (6) heterogenitas masyarakat, dan (7) adanya orientasi kehidupan di masa depan. Sementara itu, sejumlah faktor yang menghambat perubahan sosial, antara lain mencakup (1) terbatasnya kontak sosial, (2) lambatnya diseminasi iptek, (3) kekakuan sikap tradisional masyarakat, (4) kekhawatiran terjadinya disintegrasi budaya, (5) adanya prasangka terhadap nilai-nilai baru, dan (6) sikap pasrah terhadap dinamika kehidupan (Soekanto, 1999).

Sebagaimana ditegaskan di muka bahwa perubahan sosial menjadi proses yang sifatnya *embedded* pada setiap sistem sosial masyarakat. Memposisikan fenomena masyarakat Suku Baduy menjual madu ke Jakarta dan sekitarnya menjadi bagian penting proses perubahan sosial tersebut. Sebagai bagian dari kegiatan ekonomi baru, fenomena ini akan berdampak pada bangunan nilai-nilai sosio-budaya masyarakat ini.<sup>1</sup> Dalam kondisi seperti ini, tantangan yang harus dikelola adalah bagaimana dampak tersebut tidak semakin menurunkan nilai-nilai sosial dan kearifan lokal masyarakat Suku Baduy. Hal inilah yang kemudian penegasan perlunya keseimbangan ekonomi dan sosial dalam pembangunan berkelanjutan menjadi relevan (Munasinghe, 1993). Hal ini berarti bahwa tantangan utama dalam merespons fenomena tersebut adalah mengelola nilai-nilai sosio-budaya masyarakat Suku Baduy supaya tetap memiliki kerekatan (*embeddedness*) yang tinggi (Wolsink, 2007). Tujuannya sebagaimana ditegaskan Karl Polanyi bahwa *embeddedness* nilai-nilai sosio-budaya akan membatasi setiap kegiatan ekonomi (Beckert, 2007).

<sup>1</sup> Dalam segitiga aspek pembangunan berkelanjutan, aspek ekonomi mendasar masyarakat Suku Baduy adalah berkebun, berladang, dan kerajinan.

## METODE

### *Jenis Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data*

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau fenomenologis (Mulyadi, 2016). Data primer yang dipakai adalah hasil wawancara terkait dengan kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat Suku Baduy. Data ini dikumpulkan dari hasil wawancara mendalam dengan organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan di tingkat Provinsi Banten dan Kabupaten Lebak. Teknik triangulasi sumber dilakukan untuk menguji keabsahan data yang didasarkan pada sesuatu di luar sumber data tersebut, dan masyarakat Suku Baduy yang menjual di salah satu wilayah di Jakarta dan sekitarnya. Sementara itu, data sekunder mencakup serangkaian hasil sudi kepustakaan dan dokumentasi yang terkait dengan fenomena penjualan madu dan isu-isu terkait lainnya. Untuk mendukung data lapangan, penggalian data sekunder juga dilakukan melalui penelusuran hasil penelitian/kajian, berita media massa, dan dokumen penting lainnya, baik di Jakarta maupun di lapangan.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut: (a) individu-individu anggota masyarakat Suku Baduy penjual madu dan kerajinan di wilayah Jakarta dan sekitarnya, (b) individu atau orang yang memiliki otoritas terkait dengan aspek pemberdayaan masyarakat Suku Baduy dari tingkat desa sampai dengan tingkat provinsi. Termasuk di dalamnya, sejauh memungkinkan, adalah lembaga-lembaga vertikal, dan (c) individu atau tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan,

dan akademisi di tingkat lokal yang memahami, mengikuti, serta memiliki perhatian terhadap isu tersebut. Daftar informan dan tujuan wawancara disajikan dalam Tabel 1.

### *Tempat dan Waktu Penelitian*

Penelitian dipusatkan di Kota Serang dan Kota Rangkasbitung, di Dusun Ciboleger dan Cijahe (komunitas Masyarakat Baduy Luar dan Dalam) Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, serta di salah satu lokasi penjualan madu di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Pengumpulan data dipusatkan di ketiga tempat tersebut. Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut dilakukan berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut: (1) lokasi komunitas masyarakat Suku Baduy secara umum dan lokasi studi kasus dan (2) program pemberdayaan masyarakat Suku Baduy adalah program pembangunan yang selalu dikelola di tingkat provinsi dan kabupaten. Kegiatan pengumpulan data lapangan dilakukan pada bulan Juli dan Agustus 2018.

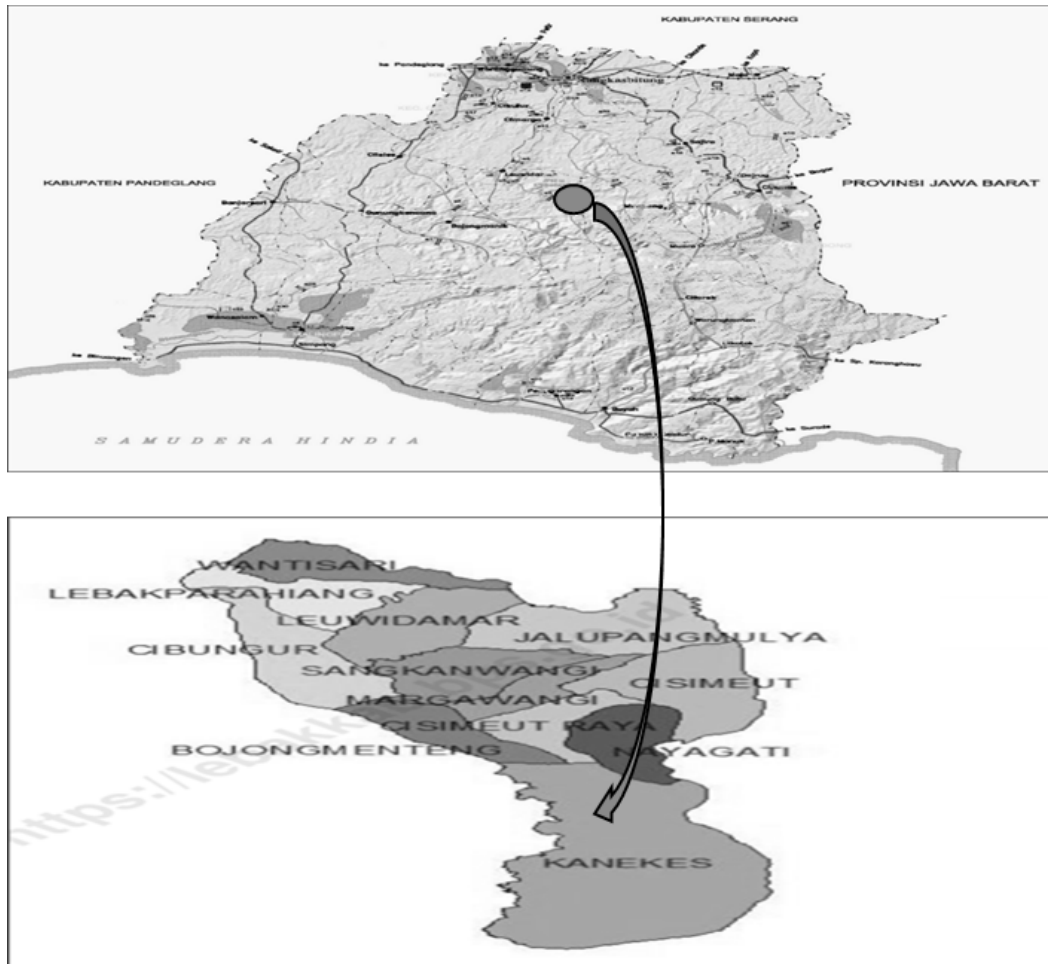
## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Tinjauan Sejarah Masyarakat Suku Baduy*

Secara geografis, masyarakat Suku Baduy terletak di wilayah selatan di wilayah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, dengan situasi topografinya sebagian besar berbukit-bukit (Prihantoro, 2006). Suku ini sendiri secara administratif masuk dalam Desa Kanekes dengan luas wilayah 5.101,85 ha dan jumlah penduduk mencapai 11.026 jiwa pada tahun 2017 (BPS Kabupaten Lebak, 2017).

**Tabel 1.** Daftar Informan dan Tujuan Wawancara

No.	Narasumber	Tujuan Wawancara	Narasumber
1.	OPD: Dinas/Badan daerah di tingkat kabupaten dan provinsi	mengetahui kebijakan pengelolaan pemberdayaan masyarakat Suku Baduy dan isu-isu persoalan sosial	Perwakilan Dinas LHK Banten, Dinas Perdagangan Banten, Litbang Bappeda Banten, Dinas Pariwisata Kab. Lebak, Dinas Sosial Kab. Lebak, Kades dan Perangkat Desa Kanekes, Ketua DPRD Kab. Lebak
2.	Masyarakat Suku Baduy yang menjual madu dan kerajinan masyarakat Suku Baduy di Jakarta dan sekitarnya	mengetahui motivasi atau tujuan mereka melakukan upaya ini	5 pemuda masyarakat Suku Baduy Luar yang menjual madu di beberapa wilayah di Kota Tangerang
3.	Lembaga vertikal di tingkat kabupaten, misalnya Perhutani	mengetahui praktik masyarakat Suku Baduy dalam upaya mencari penghidupan	KSK Kec. Leuwidamar BPS Kab. Lebak
4.	Akademisi	mengetahui pandangan mereka terhadap persoalan pemberdayaan masyarakat dan isu-isu persoalan sosial	Kajur Fisip Untirta
5.	Masyarakat/Ketua Adat	mengetahui pandangan mereka terhadap persoalan atau isu tersebut	Jawara Terminal Ciboleger, Kanekes, Ketua Adat Masyarakat Baduy Dalam Cijahe ( <i>Puun</i> ), Perwakilan Generasi Tua Masyarakat Baduy Dalam Cijahe



Sumber: Kemen-PU, 2011 dan BPS Kab. Lebak, 2018 dalam Permana, 2010.

**Gambar 1.** Lokasi Suku Baduy

Bagi sebagian pemerhati sejarah, sebutan kata “Baduy” untuk warga Desa Kanekes sebenarnya diambil dari sebuah suku di Arab, yakni “Badwi”. Nama ini kemudian dipakai oleh Belanda. Orang Baduy sendiri menyebutnya sebagai “Orang Kanekes” (Prihantoro, 2006). Berdasarkan dongeng dan cerita rakyat di Banten, kata “Baduy” datang dari nama sebuah tempat yang dijadikan tempat huniannya. Versi lain, kata “Baduy” berasal dari kata “Budha”, yang berubah menjadi Baduy. Sementara itu, pemerhati lain merujuk kata “Baduy” dari kata “Baduyut”, karena kampung yang dijadikan tempat huniannya banyak tumbuh pohon baduyut, sejenis beringin. Menurut arti sebenarnya kata Baduy berasal dari bahasa kata Arab “Badui” atau “Badu” atau “Badaw” yang berarti “lautan pasir” (Djoewisno, 1987). Mata pencaharian utama Masyarakat Baduy adalah berladang atau bercocok tanam di huma. Orang Baduy mengagungkan padi yang dilambangkan sebagai *Nyi Pohaci Sanghyang Asri* yang harus ditanam menurut ketentuan-ketentuan *karuhun* sebagaimana dipraktikkan nenek moyang mereka. Padi ditanam dilahan kering, huma yang berada di luar dan di dalam desa. Larangan menanam berada

di hutan larangan yang berupa hutan tua di wilayah Baduy Dalam. Dengan fokus penanaman padi di ladang sekali musim tanam setiap tahun, kehidupan Suku Baduy merupakan salah satu bentuk kehidupan subsisten yang paling tua. Kecuali padi, hasil alam berupa hasil hutan, buah-buahan, dan jenis tanaman ladang lainnya boleh dijual untuk memperoleh uang pembeli benang katun, ikan asin, garam, rokok, dan tembakau (Wilodati, tanpa tahun).

Kuatnya adat istiadat/agama dan nilai kearifan ekologisnya menjadikan hutan atau “leuweung” dibedakan oleh jenis tanaman dan aturan adat yang mendukungnya, yakni “leuweung kolot” (hutan tua), “leuweung ngora” (hutan muda), “leuweung reuma” (semak belukar lebat bekas huma), dan “jami” (semak belukar). Selain mengandalkan hasil alam, masyarakat Suku Baduy, khususnya Baduy Luar, mengandalkan kehidupannya pada hasil alam dan aktivitas perdagangan hasil alam dan kerajinan, serta menjadi tenaga kerja (Wilodati, tanpa tahun).

Praktik perladangan menjadi ciri utama kehidupan masyarakat Suku Baduy. Tradisi orang Baduy mengenal enam jenis huma yang fungsi, letak kepemilikan, pengerjaannya berbeda-beda.

Keenam jenis huma tersebut adalah huma serang (ladang khusus untuk padi yang dianggap suci dan berada di daerah Baduy Dalam (*Tangtu*), Huma *Puun* (ladang khusus milik *Puun*/Pemimpin Baduy), huma *Tangtu* (ladang milik orang-orang *Tangtu* dari tiga masyarakat Suku Baduy di Cibeo, Cikeusik, dan Cikartawana), Huma *Tuladan* (ladang bersama Baduy Luar yang hasilnya untuk keperluan desa), Huma *Panamping* (ladang warga Baduy Luar), Huma orang Baduy (dimiliki atau dikerjakan oleh orang-orang Baduy Luar yang letaknya di luar Desa Kanekes) (Garna (1993) dalam Wilodati, tanpa tahun).

Tujuh tahapan dalam proses pengelolaan huma adalah *nyacar* (menebas semak belukar dan pepohonan besar tidak ditebang), *nukuh* (menumpukkan ranting dan daun-daun pepohonan), *ganggang* (mengeringkan ranting dan dedaunan oleh teriknya matahari), *ngaduruk* (membakar ranting dan dedaunan hasil *nukuh*), *ngahuru* (membakar sisa-sisa yang masih tertinggal waktu *ngaduruk*). Setelah tahapan ini adalah kegiatan *ngaseuk* (menanam butiran padi oleh wanita hasil *muuhan* (membuat lobang) dengan *aseuk* oleh pria). Pada masa pertumbuhan, padi diurus dengan *ngored* (membersihkan rumput). Selain itu, padi juga *diubaran* atau diobati, campuran debu dapur dengan berbagai ramuan umbi sebagai pencegah hama (Kurniati, et al., 2017). Salah satu kearifan ekologis yang kental dalam aspek ini adalah penentuan waktu tanam (*ngaseuk*) sebagai cara untuk menghindari hama (Wilodati, tanpa tahun). Kearifan ini juga terjadi dalam proses pemeliharaan stok padi ke dalam sistem *Leuit* sehingga dapat memenuhi kebutuhan padi dalam jangka panjang, suatu kondisi yang dalam konteks anomali cuaca secara kekinian dapat menunjang ketahanan sistem pangan Masyarakat Baduy (Iskandar & Iskandar, 2017).

Konteks kearifan ekologis dan adat mampu menopang kehidupan dan menciptakan harmoni antara manusia dengan alam secara berkesinambungan (Prihantoro, 2006; Suryani, 2014; Permana, et al., 2017; Syarbini, 2015). Sebagai contoh, dalam pengerjaan ladang, sebelum miliknya sendiri, warga di Ke-*Pu'un*-an Cikeusik, Cibeo, dan Cikartawana, bergotong royong mengerjakan huma serang dan huma serang besar yang dibangun dari hasil panen mereka. Hasil panen juga dipakai untuk keperluan pembangunan atau perbaikan fasilitas umum seperti balai adat, jembatan, jalan, pesta adat, dan untuk skema bantuan langsung bagi masyarakat lanjut usia, janda, dan masyarakat miskin (Djoewisno, 1987 dalam Wilodati, tanpa tahun).

Kehidupan bermukiman Masyarakat Baduy tidak lepas dari pekerjaan di ladang mereka. Pada hari-hari tertentu, terdapat masa istirahat dari

pekerjaan huma, yang disebut masa-masa *Puasa Kawalu*. Setelah selesainya kegiatan rutin berhuma, para anggota keluarga biasanya berkumpul bersama di rumah mereka. Dalam prosesi ini juga dikenal *Puasa Kawalu*, dilakukan selama 3 hari dalam masa 3 bulanan yang kemudian dilanjutkan dengan upacara syukuran *Ngalaksa* atau makan bersama tetua adat (*Puun*). Upacara *Ngalaksa* biasanya dilakukan dalam bentuk prosesi pembagian nasi tumpeng oleh petugas upacara (*Palawari*) ke setiap rumah masyarakat Suku Baduy Dalam (Wiryomartono dalam Wilodati, tanpa tahun).

### **Kearifan Ekologis Masyarakat Baduy**

Hubungan timbal balik antara Masyarakat Baduy dengan alam lingkungannya dalam upaya berladang ini dapat dinamakan ekologi perladangan Masyarakat Baduy (Iskandar, 1992). Kuatnya misi kearifan ekologis Suku Baduy juga didasari pada anggapan bahwa mereka mempunyai tanggung jawab memelihara dan menjaga kesucian inti jagat, *pancer bumi* Kanekes, melalui *pikukuh*. Memelihara *pancer bumi* itu adalah tugas orang Baduy, yang dalam pelaksanaannya (*ngareksakeun*) dilakukan oleh para *Puun* yang terpilih melalui ketentuan *karuhun*. Dengan mengacu pada inti *pikukuh* menghasilkan adat istiadat dan norma-norma yang menjadi pedoman dasar kehidupan Suku Baduy. Secara umum, beberapa nilai-nilai pokok kearifan ekologis Suku Baduy dapat disajikan di bawah ini (Garna dalam Ghee & Gomes, 1993):

*Buyut nu dititipkeun ka karuhun* (Buyut titipan nenek moyang)

*Nagara satelung puluh telu* (Negara tiga puluh tiga)

*Bagawan sawidak lima* (Begawan enam puluh)

*Pancer salawe nagara* (Inti dua puluh lima negara)

*Gunung teu meunang dilebur* (Gunung tak boleh digempur)

*Lebak teu meunang dirusak* (Lembah tak boleh dirusak)

*Larangan teu meunang dirempak* (Larangan tak boleh dilanggar)

*Buyut teu meunang dirobah* (Buyut tak boleh dirubah)

*Lojor teu meunang dipotong* (Panjang jangan dipotong)

*Pondok teu meunang disambung* (Pendek jangan disambung)

*Nu lain kudu dilainkeun* (Yang lain pandanglah lain)

*Nu ulah kudu diulahkeun* (Yang dilarang haruslah dilarang)

*Nu enya kudu dienyakeun* (Yang benar pandanglah benar)

*Buyut* itu memiliki makna yang relatif lengkap, *buyut* dapat diartikan sebagai norma, tabu, larangan, aturan, pedoman, ataupun kendali sosial terhadap tingkah laku serta tindakan warga masyarakat. *Buyut* telah teruji sepanjang masa, dari mulai nenek moyang mereka sampai kini dan menunjukkan fungsi dan perannya dalam masyarakat yang mengendalikan aspek sosial dan menjaga keseimbangan kehidupan. Dengan demikian, hubungan antara manusia, pandangan manusia terhadap diri dan lingkungan hidupnya, serta perilaku manusia terhadap sesamanya dan perilakunya terhadap lingkungan hidup menggunakan norma-norma yang terdapat dalam kebudayaannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Otto Soemarwoto, yang menyatakan bahwa orang timur terdapat kecenderungan untuk mencapai keselarasan dengan lingkungan (Soemarwoto, 2004). Dengan demikian, hubungan timbal balik antara masyarakat Suku Baduy dengan lingkungan, umumnya mempunyai pandangan yang imanen. Argumennya, sistem biofisik merupakan sumber daya yang menyediakan semua kebutuhan hidup. Namun demikian, cara pemanfaatannya untuk kepentingan sosial juga harus disertai dengan usaha menjaga keberlanjutan ekosistem. Dengan demikian salah satu persepsi Suku Baduy tentang kebutuhan dasar tidak terletak pada kemakmuran materi tetapi lebih pada keserasian manusia dengan lingkungannya.

Masyarakat Suku Baduy dikenal sebagai masyarakat yang sangat taat terhadap nilai-nilai sosio-budayanya. Perubahan tetap terjadi pada masyarakat ini seiring dengan kuatnya perubahan lingkungan masyarakat di luar seperti halnya terjadi pada sistem pertanian yang dianut selama ini baik terhadap budidaya tanaman keras maupun tanaman pangan (Iskandar, 1992). Aspek perubahan lain terjadi pada pengembangan sistem perladangan Baduy dan industri rumah tangga. Pada industri rumah tangga, upaya pengembangan kerajinan tradisional yang berskala rumah tangga seperti rajutan kantong jarog atau koja, kain tenun, dan lain-lain mencerminkan hal ini (Maharani, 2009).

### ***Dinamika Penjualan Madu ke Jakarta dan Sekitarnya dan Isu Pembangunan Sosial***

Data statistik resmi seberapa besar kelompok masyarakat Suku Baduy yang menjual madu ke Jakarta dan sekitarnya tidak tersedia. Mendasarkan pada pendekatan kualitatif fenomenologi kajian ini, identifikasi fenomena masyarakat Suku Baduy yang menjual madu ke Jakarta dan sekitarnya hanya didasarkan pada data observasi di lapangan dan data media massa. Hal ini dapat dipahami setidaknya-tidaknya karena dua hal. *Pertama*, masih

terbatasnya pengelolaan isu-isu sosial masyarakat Suku Baduy oleh pemerintah daerah. Hal ini tentu didasarkan pada tertutupan sistem/kelembagaan sosio-budaya masyarakat tersebut dan keterbatasan kehadiran pemerintah di wilayah mereka akibat konteks geografis yang sulit dijangkau. *Kedua*, fenomena tersebut lebih didorong oleh inisiasi kelompok-kelompok kecil masyarakat Suku Baduy atas dasar pengalaman sehingga tidak terlembagakan ke dalam aksi-aksi sosial ekonomi yang terstruktur. Dengan demikian, fenomena ini tidak dapat diukur secara baik oleh pemerintah.<sup>2</sup>

Sebagai sebuah fenomena sosial yang semakin kuat, bagaimanapun, fenomena masyarakat Suku Baduy yang menjual madu ke Jakarta dan sekitarnya dapat diidentifikasi keberadaannya di wilayah-wilayah infrastruktur transportasi massal, seperti di stasiun-stasiun kereta api, terminal bus, pelabuhan, dan beberapa kawasan perumahan elit di Jakarta. Secara empiris, fenomena ini terlihat dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 2-5 orang masyarakat Suku Baduy yang berdasarkan salah satu ciri umumnya adalah masyarakat Suku Baduy Luar (Garna *dalam* Ghee & Gomes, 1993; Syarbini, 2015). Dengan perhitungan, terdapat 25 stasiun-stasiun kereta api kelas menengah/besar lintas komuter di Jakarta dan sekitarnya dan dengan perhitungan setidaknya-tidaknya 4 orang penjual madu, berarti 100 orang masyarakat Suku Baduy mangkal dan menjajakan madu. Dengan potensi terjadinya efek domino, apalagi pada musim tidak tanam, hal ini menyiratkan bahwa fenomena ini akan berpotensi menjadi besar, kondisi yang pada akhirnya dapat menimbulkan isu persoalan sosio-budaya dan keberlanjutan.

Konteks isu alih fungsi lahan terkait dengan fenomena ini sedikit banyak akan terkait dengan isu ketersediaan sumber daya lokal (Republika.co.id., 2016). Studi Walhi menunjukkan bahwa usulan pemerintah daerah (pemda) Lebak untuk melakukan perubahan fungsi kawasan hutan di sebagian wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak, akan mengancam kawasan pelestarian alam di sana (Walhi Jabar, 2012). Satu usulan penambahan lahan dalam kebijakan hutan adat di masyarakat Suku Baduy untuk sebagian menunjukkan bahwa isu alih fungsi lahan juga terjadi di wilayah masyarakat Suku Baduy. Memposisikan fenomena masyarakat Suku Baduy menjual madu ke Jakarta dan sekitarnya dengan isu alih fungsi lahan di sana tentu membutuhkan kajian lebih dalam. Sebagian tokoh politik lokal bahkan meragukan

<sup>2</sup> Wawancara dengan Sarpin, Kaur Pemerintahan Desa Kanekes yang juga warga Baduy Luar, 31 Juli 2018 dan wawancara dengan Usep, Kasubbag Program, Dinas Pariwisata Kab. Lebak, 3 Agustus 2018.



hal ini.<sup>3</sup> Ada beberapa alasan untuk hal ini. Kuatnya nilai-nilai sosio-budaya setempat yang menjadikan lahan sebagai 'modal kehidupan' yang tidak ternilai secara sosio-budaya dan ekonomis menjadikan fenomena alih fungsi lahan hanya bisa terjadi oleh aktor negara dan nonnegara (Permana, *et al.*, 2017).<sup>4</sup> Alasan lain, data statistik kehutanan menunjukkan kecilnya tingkat deforestasi di wilayah Banten. Selain itu, data statistik tentang perkembangan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan dalam proses *review* Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) sampai Desember 2017 juga menunjukkan bahwa Provinsi Banten tidak mengajukan usulan tersebut. Kasus yang sama untuk perkembangan pelepasan kawasan hutan untuk budidaya pertanian dan non-kehutanan lainnya (tahapan SK pelepasan kawasan hutan) sampai tahun 2017. Data menunjukkan bahwa dari 0,8 juta ha deforestasi tahunan secara nasional, Provinsi ini justru menambah kawasan hutan seluas 2.534,43 ha hutan sekunder (KLHK, 2018). Hal ini mengindikasikan bahwa dalam konteks struktural isu alih fungsi kawasan hutan, khususnya kawasan lindung dan konservasi yang sebagian menjadi wilayah masyarakat Suku Baduy, kurang relevan. Dengan demikian, dinamika struktural pada fenomena masyarakat Suku Baduy yang menjual madu ke Jakarta dan sekitarnya lebih bersifat internal.

### **Dinamika Sosial-Ekonomi dan Budaya**

#### **1. Faktor-Faktor Pendorong dan Konteks Perubahan Sosial Fenomena Penjual Madu Masyarakat Suku Baduy**

Perubahan sikap rasionalisme ekonomis sebagian warga Baduy, khususnya generasi muda, menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya fenomena penjualan madu masyarakat Suku Baduy ke Jakarta dan sekitarnya. Hal ini untuk sebagian juga dikuatkan dengan tekanan budaya populer, misalnya didorong oleh masuknya alat komunikasi khususnya di Masyarakat Baduy Luar.<sup>5</sup> Dengan

<sup>3</sup> Wawancara dengan Junaedi Ibnu Jarta, Ketua DPRD Kab. Lebak, 3 Agustus 2018.

<sup>4</sup> Wawancara dengan Kusbandriyo, Sekdis Sosial Kab. Lebak, 30 Juli 2018.

<sup>5</sup> Secara normatif, adat melarang penggunaan alat komunikasi seperti ini, seperti halnya kegiatan menempuh pendidikan bagi generasi muda. Tetua adat telah sering melakukan rasia khususnya di lingkungan Baduy Luar. Namun demikian, secara empiris kepemilikan HP misalnya, bagi sebagian masyarakat khususnya Masyarakat Baduy Luar generasi muda sudah menjadi rahasia umum. Hal yang sama pun ditengarai terjadi di lingkungan Masyarakat Baduy Dalam meskipun sangat terbatas. Selain itu, semakin terbukanya sikap masyarakat Baduy terhadap budaya populer misalnya dapat dilihat dari fenomena Masyarakat Baduy yang mulai menonton TV dan mendengarkan radio di pintu-pintu masuk kawasan Baduy.

demikian, fenomena ini sebagai hal yang secara sosial dan ekonomis lumrah untuk mendekatkan produk mereka ke konsumen dengan ekspektasi nilai tambah ekonomis yang lebih besar. Rasionalisme ini juga bisa dilihat dalam konteks cukupnya pasokan madu di Lebak sendiri karena sekarang madu juga telah dibudidayakan. Dengan demikian, fenomena ini juga terkait dengan semakin jenuhnya pasar konvensional yang biasa disasar sebelumnya di sekitar Banten, faktor akses info pasar yang lebih besar, dan transportasi yang semakin mudah. Dengan demikian, semakin banyaknya fenomena penjualan madu masyarakat Suku Baduy akibat interaksi mereka dengan dunia luar, seperti masyarakat pendatang dan umum.

Produk madu sebenarnya tidak signifikan di masyarakat suku ini dan sifatnya hanya sambilan. Kegiatan pencarian nafkah masyarakat Suku Baduy, khususnya Baduy Luar misalnya, adalah membuat gula aren, berkebun/bertani, dan menjadi buruh kebun. Selain itu, membuat golok, bertenun, dan membuat batik. Bagi anak muda Suku Baduy, menjual madu ditujukan untuk membantu orang tua atau mencari pengalaman. Dengan demikian, dengan kegiatan utama di atas, sebenarnya sudah cukup.<sup>6</sup>

Yang lebih dominan sekarang ini justru Batik Baduy, khususnya Baduy Luar seiring dengan semakin terbukanya sikap mereka dan permintaan pasar yang semakin besar. Dukungan Pemda Lebak dan Banten dalam program-program promosi wisata dan budaya masyarakat adat memperkuat fenomena ini.<sup>7</sup> Dengan demikian, fenomena ini tidak ada kaitannya dengan isu alih fungsi lahan apalagi konteks sosio-budaya yang sangat ketat. Isu lain yang melekat pada fenomena ini adalah isu keaslian madu. Secara umum, sebagian besar informan melihat isu ini sebagai hal yang lumrah apalagi jika harganya murah dan masyarakat Suku Baduy sendiri telah mengenal uang.

Terlepas dari itu semua, hal ini sebenarnya membawa nilai positif, yakni menambah tingkat kesejahteraan relatif lebih tinggi meskipun sebagian nilai-nilai budayanya berpotensi akan tercerabut. Meskipun demikian, tanpa ada fenomena seperti ini pun, Suku Baduy pun akan berubah di tengah semakin banyaknya penduduk dan semakin merosotnya lahan

<sup>6</sup> Sambilan juga dalam arti pada musim kering dan adanya permintaan dari pasar secara langsung, baik secara lisan ketika mereka di luar kota maupun dengan menggunakan alat komunikasi, atau orang-orang terdekat di pemerintahan Lebak. Wawancara dengan Rohman, Koordinator Terminal Aweh, Dishub Lebak, 28 Juli 2018.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Sam'ani Kasie Peningkatan Kapasitas DLHK Prov Banten, 9 Juli 2018, dengan Yunia. Litbang Bappeda Provinsi Banten, 10 Juli 2018.

garapan. Hal ini menyiratkan pemahaman bahwa tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup seiring dengan tingkat pertumbuhan penduduk juga menjadi faktor yang turut mendorong adanya fenomena penjualan madu. Dengan demikian, rasionalisme ekonomis juga bisa dilihat dalam konteks ini.

Data menunjukkan bahwa program bantuan Beras Sejahtera (Rastra) tercatat paling banyak di masyarakat Suku Baduy, yakni 1.035 kepala keluarga (KK) dari 4.580 KK di Kecamatan Leuwidamar meskipun banyaknya bantuan ini karena faktor kriteria penerima.<sup>8</sup> Kondisi ini menjadi tantangan kemandirian masyarakat Suku Baduy dalam tahapan kehidupan yang sifatnya subsisten (Garna *dalam* Ghee & Gomes, 1993). Dengan demikian, secara ekonomis, mereka dianggap sudah mampu dan mandiri. Sebagai gambaran, apa yang menjadi tuntutan politik mereka sekarang ini semata-mata untuk memenuhi kebutuhan antisipatif perubahan demografis ke depan dan kekhasan mereka secara budaya, yakni tuntutan penambahan luasan lahan garapan dan kolom KTP mereka dengan agama “Sunda Wiwitan”.<sup>9</sup>

Selain itu, alasan rasionalisme ekonomis ini juga akibat kuatnya fenomena menarik wisatawan/promosi wisata seiring dengan semakin banyaknya wisatawan domestik dan asing ke wilayah ini. Banyaknya wisatawan ini menjadi daya energi positif bagi masyarakat suku ini untuk terus memikirkan produk tradisional apa yang perlu dijual/dikembangkan untuk memperkuat kedudukan Baduy sebagai objek wisata. Kuatnya keyakinan bahwa Madu Baduy (Odeng) dianggap memiliki keunikan tersendiri menjadi insentif mereka untuk menjualnya keluar. Dengan demikian, fenomena pemalsuan Madu Odeng juga bisa dilihat dalam perspektif ini.<sup>10</sup>

Faktor pendorong lain adalah aspek pergeseran kehidupan sosial. Data di lapangan bahwa di wilayah masyarakat Suku Baduy Dalam dan Luar menunjukkan bahwa pola-pola pergeseran kehidupan sosial mulai dapat dikenali meskipun perubahan terhadap hal-hal yang sifatnya sangat mendasar sangat terbatas.<sup>11</sup>

<sup>8</sup> Wawancara dengan Kusbandriyo, Sekdis Sosial Kab. Lebak, 30 Juli 2018. Data lain menunjukkan bahwa kemandirian ini ditopang oleh hasil lahan mereka dan kuatnya hukum adat yang mempertahankan waktu pembukaan *leuit* (lumbang padi). Wawancara Aman, KSK Kec. Leuwidamar, BPS Kab. Lebak, 30 Juli 2018. Wawancara dengan Junaedi Ibnu Jarta, Ketua DPRD Kab. Lebak, 3 Agustus 2018.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Junaedi Ibnu Jarta, Ketua DPRD Kab. Lebak, 3 Agustus 2018.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Sarpin, Kaur Pemerintahan Desa Kanekes yang juga Warga Baduy Luar, 31 Juli 2018; Juga wawancara dengan Usep, Kasubbag Program, Dinas Pariwisata Kab. Lebak, 3 Agustus 2018.

<sup>11</sup> Aspek-aspek tersebut misalnya, sistem kepercayaan, sistem bercocok tanam, dan sistem kekerabatan.

Salah satunya misalnya, sikap masyarakat yang mulai terbuka terhadap ‘nilai-nilai baru’ dari luar, baik karena pengaruh orang-orang di luar wilayah mereka dan nilai-nilai baru melalui media massa. Untuk sebagian, pola pergeseran ini diakibatkan oleh rasionalisme ekonomis di atas dan untuk sebagian lagi akibat kuatnya tekanan kebutuhan hidup.

Perubahan sikap masyarakat yang awalnya mendasarkan sumber kehidupan mereka pada hasil alam lalu berubah menjadi penyedia jasa, misalnya jasa tenaga kerja pada masyarakat Suku Baduy sendiri maupun bekerja pada orang-orang di luar suku ini menguatkan fenomena ini.<sup>12</sup> Pergeseran lainnya khususnya yang didorong oleh rasionalisme ekonomis adalah sikap yang semakin terbuka terhadap pola kehidupan jasa. Sebagai contoh, Masyarakat Baduy Luar sebelumnya memandang kerajinan tenun hanya diwariskan secara turun-temurun dan kecilnya animo generasi muda untuk belajar, kini, seiring dengan tuntutan hidup yang lebih baik, antusiasme generasi muda Suku Baduy untuk belajar dan bekerja sebagai penenun semakin kuat sehingga ‘industri rumah tangga’ tenun mulai berkembang. Hal lain adalah pergeseran sikap masyarakat Suku Baduy terhadap orang luar. Satu kasus menunjukkan bahwa masyarakat di salah satu komunitas Suku Baduy Dalam tidak lagi resisten terhadap orang luar yang menjajakan barang dagangan, misalnya buah-buahan atau makanan ringan anak-anak di lingkungan mereka yang tidak jarang mereka menginap di salah satu warga Baduy Dalam.<sup>13</sup>

Pola pergeseran ini tentu membawa beberapa konsekuensi. *Pertama*, secara positif hal ini akan memberikan nilai-nilai baru dalam pola kehidupan sosial secara umum. Sebaliknya, *kedua*, pergeseran ini juga dapat berdampak pada persoalan kemanusiaan di kemudian hari. Sebagai contoh, semakin banyaknya anak-anak Suku Baduy yang mengkonsumsi makanan ringan yang notabene tidak sehat dan cenderung tinggi gula/kalori akan berpotensi memunculkan paparan penyakit bagi mereka. Dalam konteks sosio-budaya masyarakat suku ini yang masih mengandalkan pada sistem pengobatan tradisional dan belum memberikan kepercayaan kepada tenaga medis, skenario dampak ini akan memunculkan persoalan bagi pemda ketika terjadi banyaknya, misalnya kasus gizi buruk atau merebaknya penyakit. *Ketiga*, potensi konflik/

<sup>12</sup> Wawancara dengan Yanda (pemandu penelitian) dan salah seorang anggota Masyarakat Baduy, 1 Agustus 2018.

<sup>13</sup> Awalnya mereka sering menginap karena menunggu hasil bumi Warga Baduy, belakangan sambil menunggu barang dagangan mereka juga berdagang di tengah-tengah pemukiman Baduy Dalam.

gesekan antara masyarakat 'pendatang' musiman dengan warga setempat. Hubungan 'sewa' lahan/ rumah untuk menginap, misalnya, lambat laun akan semakin dipatok pada harga yang rasional sehingga akan mendorong 'pendatang' musiman akan berganti-ganti sesuai dengan tingkat harga yang lebih murah. Akibatnya, potensi konflik antarwarga Suku Baduy dan/atau antara warga Suku Baduy dengan 'pendatang' musiman pun tidak terhindarkan.<sup>14</sup>

Selain kedua faktor rasionalisme ekonomi dan pergeseran pola kehidupan sosial, faktor pertumbuhan demografis juga sedikit banyak dapat memengaruhi fenomena penjualan madu masyarakat Suku Baduy ke Jakarta dan sekitarnya. Berbicara pertumbuhan demografis akan berkorelasi dengan persoalan sumber daya khususnya pangan. Beberapa kasus gesekan horisontal terkait pembagian sumbangan pasokan pasca-kebakaran di wilayah Baduy Dalam, dan kondisi pasokan bahan pangan yang sulit dalam masa tertentu misalnya, pada saat kekeringan panjang akan mendorong sebagian masyarakat khususnya generasi muda akan mencari peluang ekonomis.<sup>15</sup>

Faktor demografis sebagai hal yang memengaruhi hal ini misalnya dapat dirujuk pada data statistik. Pada tahun 2017 jumlah penduduk Desa Kanekes sebanyak 11.699 jiwa (Suku Baduy dan Kampung Cicakal Girang), jumlah penduduk terbanyak dari 13 desa di wilayah Kecamatan Leuwidamar. Dari jumlah ini, penduduk Suku Baduy mencapai 11.026 jiwa. Data juga menunjukkan bahwa anak usia balita di wilayah Desa Kanekes juga paling banyak di tingkat kecamatan yang mencapai 2.340 jiwa atau 23,4 persen dari keseluruhan penduduk usia balita yang mencapai 9.989 jiwa (BPS Kabupaten Lebak, 2018). Dengan tingkat pertumbuhan penduduk 0,84 persen per tahun, tertinggi di tingkat kecamatan se-Kabupaten Lebak, berarti dalam satu tahun tambahan penduduk dari Suku Baduy akan mencapai 92-93 jiwa (BPS Kabupaten Lebak, 2018). Dengan demikian, dapat dipahami ketika salah satu tuntutan masyarakat Suku atau Kasepuhan Baduy adalah tuntutan penambahan lahan garapan.<sup>16</sup>

Faktor pendorong terakhir fenomena penjualan madu masyarakat Suku Baduy ke Jakarta dan sekitarnya adalah efek-tetes masyarakat non-Suku Baduy sendiri. Sebagaimana telah disinggung bahwa dengan reputasi Masyarakat Baduy yang jujur dan

kualitas Madu Odeng itu sendiri, permintaan madu dari luar sudah tentu menjadi peluang tersendiri bagi masyarakat sekitar Suku Baduy untuk memanfaatkan 'peluang ekonomis' ini. Data wawancara lapangan dengan mereka yang berjualan meskipun secara fisik memiliki kemiripan dengan masyarakat Suku Baduy, dari komunikasi terlihat kurang begitu memahami asal tinggal mereka sendiri.<sup>17</sup> Data wawancara mendalam dengan beberapa informan, termasuk di dalamnya adalah Ketua DPRD Kabupaten Lebak, menunjukkan kepercayaannya bahwa potensi pemalsuan madu oleh orang-orang non-Suku Baduy sangat mungkin dilakukan. Salah satu indikatornya adalah tingkat harganya yang murah. Selain itu, pemalsuan oleh orang-orang non-Suku Baduy juga dilandasi ketidakpercayaan sebagian informan bahwa secara sosiologis Suku Baduy mampu mengoplos/ membuat barang palsu. Dengan demikian, kemungkinan dilakukan oleh masyarakat Suku Baduy Luar dengan orang-orang lain pencari rente, orang-orang non-Suku Baduy yang berperilaku seperti orang Suku Baduy, baik di dalam maupun luar wilayah Suku Baduy sendiri itu, sangat kuat.<sup>18</sup>

Fenomena terjadinya penjualan madu karena faktor rasionalisme ekonomi, pergeseran pola kehidupan sosial, pertumbuhan penduduk, dan efek tetesan non-Baduy sendiri secara umum bisa dilihat dalam konteks dinamika perubahan sosial budaya masyarakat Suku Baduy yang terus terjadi seiring dengan perubahan waktu, pengaruh nilai-nilai kultur luar, dan faktor internal Suku Baduy itu sendiri (Permana, 2009). Beberapa aspek perubahan seperti dalam aspek keyakinan, kehidupan sosial-budaya, dan perladangan menggambarkan secara jelas dinamika kehidupan sosio-ekonomi dan budaya mereka. Fenomena penjualan madu ke Jakarta dan sekitarnya sebagian masyarakat Suku Baduy yang notabene sebagai bagian dari pola kehidupan sosio-budaya dan ekonomis pun tidak luput dari penilaian ini (Permana, 2009).

## **2. Dampak Fenomena Suku Baduy Penjual Madu ke Jakarta dan Sekitarnya**

Memposisikan konteks perubahan sosial dalam kerangka bangunan sistem sosio-budaya masyarakat Suku Baduy yang menjual madu ke Jakarta dan sekitarnya akan sangat terkait dengan persoalan konteks struktur dan proses sosial. Sejalan dengan pertumbuhan penduduknya, konteks tekanan budaya luar, dan imbas pertarungan kepentingan antarelit di daerah, serta dalam batas tertentu isu alih

<sup>14</sup> Sebagian pandangan ini didukung dengan pandangan hasil wawancara dengan Dr. Abdul Hamid, Kaprodi Ilmu Pemerintahan, Fisip Untirta, 27 Juli 2018.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Dr. Abdul Hamid, Kaprodi IP, Fisip Untirta, 27 Juli 2018.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Junaedi Ibnu Jarta, Ketua DPRD Kab. Lebak, 3 Agustus 2018.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Penjual Madu dan Kerajinan Suku Baduy di Tangerang, 29 September 2018.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Junaedi Ibnu Jarta, Ketua DPRD Kab. Lebak, 3 Agustus 2018.

fungsi lahan, juga berpengaruh terhadap fenomena tersebut. Tekanan budaya luar dalam perspektif gaya hidup menjadikan kehidupan subsisten masyarakat setempat tidak lagi dapat dipertahankan dalam batas tertentu. Akibatnya, mereka berusaha mencari sumber penghidupan lain di luar kegiatan perladangan.<sup>19</sup>

Konteks aspek struktural yang memengaruhi masyarakat Suku Baduy yang menjual madu ke Jakarta adalah perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi sehingga memungkinkan masyarakat tersebut dapat menjangkau wilayah Jakarta dan sekitarnya melalui penajagan produk madu secara langsung.<sup>20</sup> Dorongan struktural ini juga semakin kuat seiring dengan semakin jenuhnya pasar konvensional mereka seperti di daerah sekitar Banten.<sup>21</sup> Tentu saja, dalam perkembangannya, fenomena masyarakat Suku Baduy menjual madu ke Jabodetabek juga ditentukan oleh proses sosial yang ditimbulkan oleh sikap rasionalisme mereka untuk menangkap peluang ekonomis mereka. Pengaruh teknologi informasi melalui alat komunikasi dan pengalaman mereka ke Jakarta dan sekitarnya memunculkan efek pengaruh pada sesama masyarakat Suku Baduy khususnya Masyarakat Baduy Luar untuk menyikapi peluang ekonomi menjual madu secara langsung ke Jakarta dan sekitarnya.

Dalam perspektif sosiologis, akses masyarakat Suku Baduy terhadap kelembagaan infrastruktur dan teknologi komunikasi yang baru dalam batas tertentu bersifat semakin memfasilitasi dinamika prosedural sikap rasionalisme masyarakat menjual madu ke Jakarta dan sekitarnya (Wirutomo, 2014). Fenomena ini semakin kuat karena penjualan madu ini sifatnya sambilan ketika musim kering, dan upaya membantu orang tua atau mencari pengalaman. Dikatakan fenomena ini sebagai pekerjaan sambilan karena secara tradisional, masyarakat Suku Baduy menggantungkan hidupnya pada berkebun/bertani, membuat gula aren, membuat golok, bertenun, dan membuat batik.<sup>22</sup> Dengan demikian, fenomena penjualan madu ini sebenarnya tidak mengurangi perspektif keswasembadaan masyarakat Suku Baduy itu sendiri.<sup>23</sup>

Namun demikian, fenomena tersebut, dalam batas tertentu, juga karena persoalan kebutuhan

<sup>19</sup> Wawancara dengan Dr. Abdul Hamid, Kaprodi IP, Fisip Untirta, 27 Juli 2018.

<sup>20</sup> Wawancara Aman, KSK Kec. Leuwidamar, BPS Kab. Lebak, 30 Juli 2018.

<sup>21</sup> Diskusi dengan Yunia dan Muslihin, Bidang Litbang Bappeda Prov. Banten, 10 dan 12 Juli 2018.

<sup>22</sup> Wawancara Aman, KSK Kec. Leuwidamar, BPS Kab. Lebak, 30 Juli 2018.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Junaedi Ibnu Jarta, Ketua DPRD Kab. Lebak, 3 Agustus 2018.

lahan yang semakin berkurang akibat perkembangan penduduk, pengaruh musim yang semakin tidak menentu, dan ketergantungan hidup mereka pada hasil alam. Dengan demikian, untuk mempertahankan eksistensinya, keberadaan lahan adat harus dipertahankan dan jika memungkinkan ditambah untuk menyeimbangkan dengan penambahan jumlah penduduk.<sup>24</sup> Secara sosial politis, hal ini dapat dilihat dalam konteks empiris berikut ini. Dengan tingkat pertumbuhan penduduknya tertinggi di wilayah Kecamatan Leuwidamar, persoalan sumber kebutuhan pangan masyarakat suku ini yang mengandalkan pada lahan garapan juga akan mendorong tuntutan perluasan lahan ini dalam jangka panjang. Hal ini tidak berlebihan ketika salah satu tuntutan 'politis' Suku Baduy adalah penambahan lahan garapan.<sup>25</sup> Dalam konteks inilah, poin pentingnya adalah kebutuhan optimalisasi implementasi kebijakan hutan adat/perhutanan sosial.

Analisis tentang isu penurunan sumber daya alam juga memperkuat analisis di atas. *Pertama*, adanya indikator sosial seperti fenomena pembelian lahan di luar kawasan KAT Suku Baduy dan menjadi buruh bagi masyarakat Suku Baduy yang lain bekerja untuk majikan Suku Baduy itu sendiri memperkuat analisis isu penurunan sumber daya alam tersebut. Selain itu, adanya perubahan nilai-nilai baru masyarakat setempat menjadi hal yang tidak bisa ditahan meskipun dari tatanan dan konvensi, pelanggaran terhadap adat kebiasaan diterapkan secara ketat.<sup>26</sup> Dengan demikian, jika tidak diantisipasi, seiring dengan pertumbuhan penduduk, dan apalagi jika usulan penambahan lahan tanah garapan tidak diakomodasi akan memunculkan konflik sekedar untuk memenuhi kebutuhan.<sup>27</sup>

Analisis terhadap peran kultur masyarakat Suku Baduy dalam konteks perubahan struktural dan sosio-budaya di luar masyarakat ini akan cenderung diproposikan bahwa *embeddedness* sosio-budaya masyarakat tersebut relatif kuat sehingga dapat mengurangi risiko tergerusnya nilai-nilai tersebut. Konteks kuatnya nilai-nilai sosio-budaya tersebut menjadikan fenomena masyarakatnya menjual

<sup>24</sup> Mekanisme pengendalian jumlah penduduk cukup baik karena adanya sistem KB mandiri dan sebagian telah menerima KB, sistem kekerabatan dan kuatnya penegakkan adat. Wawancara dengan Kusbandriyo, Sekdis Sosial Kab. Lebak, 30 Juli 2018.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Junaedi Ibnu Jarta, Ketua DPRD Kab. Lebak, 3 Agustus 2018.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Dr. Abdul Hamid, Kaprodi IP, Fisip Untirta, 27 Juli 2018; wawancara dengan Usep, Kasubbag Program, Dinas Pariwisata Kab. Lebak, 3 Agustus 2018.

<sup>27</sup> Wawancara dengan Dr. Abdul Hamid, Kaprodi IP, Fisip Untirta, 27 Juli 2018.

madu ke Jakarta dan sekitarnya sebagai fenomena musiman yang tidak merusak tatanan sosio-budaya yang ada dan justru fenomena ini harus didukung untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.<sup>28</sup> Seiring dengan telah disetujuinya status masyarakat hukum adat, aspek sosio-budaya justru semakin kuat. Adanya istilah *Bapagede* (Gubernur Banten) dan *Bapa* (Bupati Lebak) menunjukkan hal ini.<sup>29</sup> Hal ini diperkuat dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan program perhutanan sosial. Didorong oleh aspek ini, kearifan lokal tersebut sejauh ini juga mampu menghindarkan Masyarakat Baduy dari bencana, misalnya, kebakaran hutan, tanah longsor, dan banjir (Permana, *et al.*, 2017).

Persoalannya, seberapa besar masyarakat Suku Baduy mampu mengelola perubahan sosio-budaya sedemikian rupa agar *embeddedness* sosio-budaya ini tidak terganggu? Sikap promotif pemerintah daerah terhadap fenomena penjualan madu ke Jakarta dan sekitarnya merefleksikan sebuah fenomena strukturasi prosedural yang dalam jangka menengah dan panjang akan membuka ruang yang lebih banyak bagi masyarakat Suku Baduy untuk menjual madu ke Jakarta dan sekitarnya. Konteks anomali cuaca/perubahan iklim, kebutuhan tanah garapan akibat pertumbuhan penduduk, implementasi kebijakan perhutanan sosial, dan nilai ekonomis madu semakin jauh akan mengurangi *embeddedness* nilai-nilai sosio-budaya masyarakat tersebut. Pada gilirannya, bersamaan dengan fenomena kulturasi penjualan madu ke Jakarta dan sekitarnya sebagai sebuah proses sosial tidak hanya akan semakin mendorong semakin banyaknya masyarakat yang terlibat tetapi juga keterbukaan sikap dan nilai-nilai sosio-budaya mereka. Pada gilirannya, hal ini akan sejalan dengan paham Giddens yang melihat hubungan antaraspek dalam fenomena ini pada akhirnya memfasilitasi terbentuknya sebuah proses yang baru yang menciptakan kultur atau pola perilaku baru yang menurut Bourdieu sebagai *habitus* (Bellah *dalam* Wirutomo, 2014; Chong, 2015; Lamsal, 2012). Dalam konteks masyarakat yang tidak melek huruf dan tertutup, fenomena semakin banyaknya masyarakat Suku Baduy menjual madu ke Jakarta dan sekitarnya justru berpotensi akan menurunkan kesejahteraan mereka. Dalam konteks ini, fenomena tersebut akan berpotensi merusak sistem kehidupan sosio-budaya masyarakat tersebut dalam jangka menengah dan panjang. Dengan demikian, dalam perspektif pembangunan sosial, fenomena tersebut

<sup>28</sup> Wawancara dengan Kusbandriyo, Sekdis Sosial Kab. Lebak, 30 Juli 2018.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Sam'ani, Kasi Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. Banten, 9 Juli 2018.

justu akan semakin mengurangi kualitas kehidupan dan kemartabatan masyarakat tersebut (Wirutomo, 2013; Wirutomo, 2014).

### 3. Pengelolaan Sistem Sosio-Budaya dan Ekonomis Masyarakat Baduy

Fenomena penjualan madu masyarakat Suku Baduy di Jakarta dan sekitarnya, lebih didorong oleh beberapa faktor internal dan eksternal. Perubahan sikap rasionalisme ekonomis sebagian warga Baduy, khususnya generasi muda, menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya fenomena tersebut. Faktor tersebut terkait dengan pergeseran kehidupan sosial, pertumbuhan penduduk, dan efek-tetes masyarakat non-Suku Baduy sendiri.<sup>30</sup> Diakui bahwa isu lahan tidak memiliki relasi dengan fenomena penjualan madu masyarakat Suku Baduy ke Jakarta dan sekitarnya. Namun demikian, seiring dengan semakin terbatasnya tanah garapan akibat pertumbuhan penduduk masyarakat tersebut dan implementasi kebijakan perhutanan sosial/MHA, isu tanah garapan masyarakat ini juga perlu mendapat perhatian pemerintah. Tekanan budaya luar dalam perspektif gaya hidup menjadikan kehidupan subsisten masyarakat setempat tidak lagi dapat dipertahankan dalam batas tertentu. Akibatnya, mereka berusaha mencari sumber penghidupan lain di luar kegiatan perladangan (Masaaki & Hamid, 2008).

Mendasarkan pada *embeddedness* sosio-budaya mereka dalam bercocok tanam, memperlakukan alam, dan kuatnya sanksi adat (khususnya Baduy Dalam) sebenarnya menjadi modalitas penting untuk menyikapi pola-pola perubahan sosial tersebut. Dalam perspektif ini, untuk menjamin bahwa fenomena penjualan madu ke Jakarta dan sekitarnya tidak semakin menurunkan kualitas kehidupan sosio-budaya dan ekonomi, peran pemerintah untuk menjadikan fenomena ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya komplementer menjadi semakin penting. Menempatkan konteks isu perubahan kehidupan sosio-budaya sebagai hal yang berpengaruh terhadap fenomena penjualan madu ini akan memberikan potensi manfaat maupun kerugian. Potensi manfaatnya bisa diidentifikasi karena sedikit banyak akan mendorong peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, fenomena ini juga berpotensi akan menghadapkan masyarakat Suku Baduy pada persoalan yang dalam jangka panjang dapat mengalami perubahan sosial yang semakin kuat. Dalam kutub yang ekstrem, bahkan perubahan ini dapat mengarah pada

<sup>30</sup> Wawancara dengan Dr. Abdul Hamid, Kaprodi IP, Fisip Untirta, 27 Juli 2018.

persoalan sosial yang dapat memperburuk tingkat kesejahteraan dan penurunan nilai-nilai sosio-budaya secara umum.

Dengan tingkat akses pendidikan yang sangat terbatas dan tingginya keterikatan terhadap nilai-nilai sosio-budaya mereka, penjualan madu ke Jakarta dan sekitarnya akan menghadapkan mereka pada nilai-nilai sosio-ekonomi baru, yakni nilai-nilai urban yang bagaimanapun akan dapat ditularkan kepada masyarakatnya ketika mereka kembali (Alambudaya.com., 2010). Pendek kata, kuatnya 'pajanan' penjual madu dan kerajinan pada nilai-nilai budaya urban akan semakin menggerogoti kebiasaan dan adat istiadat masyarakat Suku Baduy yang dikenal mampu mempertahankannya secara ketat (Permana, 2009). Akibatnya, nilai-nilai sosio-kultural dan kearifan lokal mereka akan dapat tercerabut akibat proses internalisasi nilai-nilai baru mereka terhadap keluarga mereka (Putera, 2015). Fenomena ini tentu akan semakin mendorong pola-pola perubahan sosial, kalau tidak dapat disebut merosotnya nilai-nilai sosio-budaya dan ekonomi yang lebih besar, khususnya masyarakat Suku Baduy Luar (Permana, 2009).

Dalam konteks inilah, poin penting *kedua* adalah keperluan 'intervensi' pemerintah, khususnya pemda, untuk memperkuat program pemberdayaan masyarakat Suku Baduy dalam wilayah mereka sendiri. Sebagai contoh, pemberdayaan pasar lokal dan/atau memposisikan lembaga ekonomi daerah seperti badan usaha milik desa (Bumdes) di wilayah ibu kota kabupaten sebagai penyerap produk madu dengan tingkat harga yang kompetitif menjadi upaya rintisan yang layak disasar. Penyediaan 'subsidi' fiskal bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk usaha ini menjadi poin penting dalam perspektif ini sehingga akan dapat mengerem fenomena penjualan madu masyarakat Suku Baduy ke Jakarta dan sekitarnya. Dengan tingkat pertumbuhan penduduknya tertinggi di wilayah Kecamatan Leuwidamar, persoalan sumber kebutuhan pangan masyarakat suku ini yang mengandalkan pada lahan garapan juga akan mendorong tuntutan perluasan lahan ini dalam jangka panjang sebagaimana menjadi salah satu tuntutan 'politis' Suku Baduy terhadap pemerintah daerah.<sup>31</sup> Dalam konteks inilah, poin penting *ketiga* adalah kebutuhan optimalisasi implementasi kebijakan hutan adat/perhutanan sosial.

Ketiga poin tersebut tentu tidak mudah dilaksanakan dalam konteks rezim Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, keterbatasan anggaran di tingkat

provinsi dan kabupaten, dan kondisi sosio-budaya dan ekonomi masyarakat Suku Baduy itu sendiri. Dengan demikian, pendekatan instrumen implementasi kebijakan yang lebih mengedepankan peran negara yang lebih asertif dan afirmatif akan lebih relevan dalam kasus ini. Penguatan kerangka hukum dan kemauan politik pemerintah pusat dan pemda dalam memandang MHA masyarakat Suku Baduy sebagai nilai kekhasan tinggi dan karena itu perlu serangkaian kebijakan yang sifatnya afirmatif menjadi modalitas kondusif dalam pengelolaan isu-isu sosial, termasuk di dalamnya fenomena penjualan madu dan kerajinan masyarakat Suku Baduy keluar wilayah mereka.

## KESIMPULAN

Fenomena masyarakat Suku Baduy menjual madu ke Jakarta dan sekitarnya mencerminkan sebuah fenomena umum seiring dengan adanya pergeseran pola kehidupan secara sosio-budaya dan ekonomis. Sejumlah faktor turut berperan terhadap fenomena tersebut. Pola pergeseran kehidupan sosial tersebut, dalam batas-batas tertentu, dapat membawa konsekuensi positif bagi masyarakat tersebut. Sebaliknya, pergeseran ini juga dapat berdampak pada persoalan kemanusiaan di kemudian hari karena beberapa faktor seperti pertumbuhan penduduk, pasokan pangan pada masa tertentu, dan isu tuntutan penambahan lahan garapan.

Konteks kuatnya nilai-nilai budaya setempat yang menjadikan lahan sebagai 'modal kehidupan' yang tidak ternilai secara ekonomis dan nilai-nilai sosio-budaya menjadikan isu ketersediaan tanah garapan memiliki korelasi yang kuat sebagai upaya mengerem fenomena masyarakat Suku Baduy menjual madu ke Jakarta dan sekitarnya. Dalam konteks tersebut, dari hasil penelitian ini dapat disampaikan beberapa rekomendasi aspek tata kelola dan kebijakan sebagai berikut: (a) pemerintah pusat perlu memperkuat kemauan politiknya dalam pelaksanaan kelembagaan MHA dan program perhutanan sosial sehingga semakin memperkuat sistem sosio-budaya dan ekonomi masyarakat tersebut, (b) tata kelola yang sama juga perlu dilakukan oleh pemerintah provinsi sebagai wakil pemerintah pusat untuk memastikan bahwa kemauan politik pemerintah pusat tersebut dapat mencapai sasaran, (c) yang tidak kalah pentingnya adalah komitmen politik pemerintah kabupaten untuk mempertahankan eksistensi atau potensi kemerosotan nilai-nilai sosio-budaya dan ekonomi masyarakat Suku Baduy. Dalam konteks ini, kebijakan intervensi afirmatif pemerintah kabupaten untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat Suku Baduy yang menjual madu dapat mengerem potensi kemerosotan lebih lanjut sistem sosio-ekonomi dan budaya tersebut.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Junaedi Ibnu Jarta, Ketua DPRD Kab. Lebak, 3 Agustus 2018.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- BPS Kabupaten Lebak. (2018). *Kabupaten Lebak dalam angka 2018*. Rangkasbitung: BPS Kabupaten Lebak.
- Brundtland, G.H. (1987). *Report of the world commission on environment and development: Our common future*. Oslo: WCED.
- Garna, J. (1993). *Orang Baduy di Jawa: Sebuah studi kasus mengenai adaptasi suku asli terhadap pembangunan*. Dalam Lim Teck Ghee & Alberto G. Gomes (ed.), terj. Suku asli dan pembangunan di Asia Tenggara. Jakarta: Obor.
- Iskandar, J. (1992). *Ekologi perladangan di Indonesia: Studi kasus dari daerah Baduy Banten Selatan*. Jakarta: Penerbit Djembatan.
- KLHK. (2018). *Statistik LH dan kehutanan tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Lubis, N.H., Saringendyanti, E., Awaludin, N., Miftahul, F., & Syahputra, R. (tanpa tahun). *Sejarah Kabupaten Lebak*. Bandung: Pemda Kab. Lebak dan Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lemlit Universitas Padjadjaran.
- Miller, G.T. & Spoolman, S.E. (2016). *Environmental science*. 5<sup>th</sup> Ed., Chicago: Cengage Learning.
- Mulyadi, M. (2016). *Metode penelitian praktis, kuantitatif dan kualitatif*. Jakarta: Publica Press.
- Ms., Djoewisno. (1987). *Potret kehidupan Masyarakat Baduy: Orang-orang Baduy bukan suku terasing, Mereka yang mengasingkan diri di Banten Selatan*. Banten: Cipta Pratama.
- Prayitno, U.S. (2014). *Perubahan sosial: Dinamika perkembangan iptek dalam kehidupan masyarakat*. Jakarta. P3DI Setjen DPR RI dan Publica Press.
- Soekanto, S. (1999). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Radjawali Pers.
- Soemarwoto, Otto. (2004). *Ekologi, lingkungan hidup dan pembangunan*. Jakarta: Djembatan.
- Wirutomo, P. (2012). *Sosiologi untuk Jakarta: Menuju pembangunan sosial budaya*. Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Jakarta.
- Jurnal dan Working Paper**
- Beckert, J. (2007). The great transformation of embeddedness: Karl Polanyi and the new economic sociology. *MPIfG Discussion Paper 07/1*, Max Planck Institute for the Study of Societies Cologne (January): 1-24.
- Chong, Wu-Ling. (2015). Local politics and Chinese Indonesian business in post-Suharto Era. *Southeast Asian Studies*, 4(3), 487-532.
- Iskandar, J. & Iskandar, B.S. (2017). Kearifan ekologi Orang Baduy dalam konservasi padi dengan 'Sistem Leuit'. *Jurnal Biodjati*, 2(1), 38-51.
- Lamsal, M. (2012). The structuration approach of Anthony Giddens. *Himalayan Journal of Sociology & Antropology*, V, 111-122.
- Maharani, S.D. (2009). Perempuan dalam kearifan lokal Suku Baduy. *Jurnal Filsafat*, 19(3), 199-213.
- Masaaki, O. & Hamid, A. (2008). *Jawara in power, 1999-2007*. *Indonesia* 86, 109-138.
- Mizuno, K., Mugniesyah, S.S., Herianto, A.S., & Tsujii, H. (2013). *Talun-Huma*, Swidden Agriculture, and rural economy in West Java, Indonesia. *Southeast Asian Studies*, 2(2), 351-381.
- Permana, R.C.E. (2009). Masyarakat Baduy dan pengobatan tradisional berbasis tanaman. *Wacana*, 11(1), 81-94.
- Permana, R.C.E., Nasution, I.P., Nugraha, Y.A., & Putra, H. (2017). Sosialisasi kearifan lokal Masyarakat Baduy dalam mitigasi bencana di perbatasan Wilayah Baduy. *Paradigma*, 4(1), 27-42. DOI: 10.17510/paradigma.v4i1.157.
- Suhadi. (2012). Etika Masyarakat Baduy sebagai inspirasi pembangunan. *Komunitas* 4 (1), 65-72.
- Suryani, I. (2014). Menggali keindahan alam dan kearifan lokal Suku Baduy, Studi kasus pada acara feature dokumenter "Indonesia Bagus" di Stasiun Televisi NET.TV. *Musawa*, 13(2), 179-193.
- Syarbini, A. (2015). Kearifan lokal Baduy Banten. *Refleksi*, 14(1), 55-74.
- Wahid, M. (2011). Sunda Wiwitan Baduy: Agama penjaga alam lindung di Desa Kanekes Banten. *El-Harakah*, 13(2), 150-168.
- Wirutomo, P. (2014). Sociological reconceptualization of social development: With empirical evidence from Surakarta City, Indonesia. *Asian Social Science*, 10(11), 283-293.

Wolsink, M. 2007. Planning of renewables schemes. Deliberative and fair decision-making on landscape issues instead of reproachful accusations of non-cooperation. *Energy Policy*, 35(5), 2.692-2.704. doi:10.1016/j.enpol.2006.12.002. pp.

### **Makalah dan Kertas Kerja**

Helmi, S. (2018). Analisis sosial kelompok Masyarakat Baduy. Makalah Program Studi Magister Biomanajemen, Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, ITB.

Kurniati, S., Setyowati, I. & Saryoko, A. (2017). Kearifan lokal masyarakat Suku Baduy dalam mengendalikan hama dan penyakit padi. Prosiding Seminar Nasional Agroinovasi Spesifik Lokasi Untuk Ketahanan Pangan pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN di Balitbang Lampung.

Munasinghe, M. (1993). Environmental economics and sustainable development. World Bank Environment Paper No. 3. Washington, D.C.: The World Bank.

Permana, R.C.E. (2010). Kearifan lokal Masyarakat Baduy menghadapi perubahan sosial. Makalah disampaikan dalam forum Seminar Antarabangsa Bersama Universiti Kebangsaan Malaysia dan Universitas Indonesia (SEBUMI 3), 16-18 Desember 2010, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia.

Prihantoro, F. (2006). Kehidupan berkelanjutan masyarakat Suku Baduy. Jakarta: Bintari Foundation dan Asia Good ESD Practice Project.

### **Internet**

Alambudaya.com. (2010). Asal usul Suku Baduy/Kanekes Banten. Diperoleh tanggal 8 Maret 2018, dari <http://www.alambudaya.com/2010/07/asal-usul-suku-Baduykanekes-banten.html>.

Putera, A.D. (2015). Waspada, penjual madu palsu mengaku penduduk asli Suku Baduy!. Diperoleh tanggal 8 Maret 2018, dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2015/07/02/17162131/Waspada.Penjual.Madu.Palsu.mengaku.Penduduk.Asli.Suku.Baduy>).

Republika.co.id. (2016). Semangat Baduy jual madu hutan ke ibu kota. Diperoleh tanggal 7 Maret 2018, dari <http://www.republika.co.id/berita/koran/kesra/16/04/15/o5ny47-semangat-Baduy-jual-madu-hutan-ke-ibu-kota>.

Walhi Jabar. (2012). Rencana alih fungsi kawasan TNGHS ancam perusakan ekosistem hutan yang lebih masif...!. Diperoleh tanggal 7 Maret 2018, dari <https://walhijabar.wordpress.com/2012/11/12/rencana-alih-fungsi-kawasan-tnghs-ancam-perusakan-ekosistem-hutan-yang-lebih-masif/>.

Wilodati. (tanpa tahun). Sistem perladangan Masyarakat Baduy. Diperoleh tanggal 21 Agustus 2018, dari [http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M\\_K\\_D\\_U/196801141992032-Wilodati/Jurnal\\_Baduy.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/196801141992032-Wilodati/Jurnal_Baduy.pdf).